

ANALISIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI SAAT PANDEMI COVID-19

Fabiani Vanda Susanto¹

I Wayan Wenagama²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali,
Indonesia

ABSTRAK

Pembangunan daerah sangat diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi seperti mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pendidikan yang sangat rendah serta ketimpangan lainnya antar kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan data panel dengan data time series dari tahun 2017-2021 sehingga total pengamatan sebanyak 45. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan metode pengumpulan data yaitu observasi non partisipan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pandemi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, upah minimum kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Kata kunci: *Pandemi, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, Kesejahteraan Masyarakat*

ABSTRACT

Regional development is expected to be able to overcome ongoing problems such as reducing poverty levels, unemployment rates, very low education and other inequalities between regencies/cities so as to improve people's living standards. This study uses panel data with time series data for 5 years from 2017-2021 so are 45 observation points. The data used is secondary data with data collection methods, namely non-participant observation. The data collected was then analyzed using panel data regression analysis techniques and multiple linear regression analysis. The results showed that the pandemic had negative and significant effect on people's welfare, the district minimum wage had positive and significant effect on people's welfare, and unemployment had no effect on people's welfare in the Regency/City of Bali Province.

Keywords: Pandemic, District Minimum Wage, Unemployment, Community Welfare

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara termasuk di Indonesia. Banyak kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan yang merata di setiap daerah. Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah tidak terkecuali bagi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali.

Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya yakni dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia merupakan modal suatu bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia dimana manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif dalam mengumpulkan modal, membangun organisasi sosial, ekonomi, politik, dan melaksanakan pembangunan nasional (Krismiyati, 2017).

Pembangunan daerah sangat diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi seperti mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pendidikan yang sangat rendah serta ketimpangan lainnya antar kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rosita, 2016). Ketimpangan serta kesenjangan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh sumber daya manusia, perubahan demografi, pengangguran, dan migrasi sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi tidak merata (Silvia dan Sumarto, 2014).

Kesejahteraan diwujudkan agar masyarakat dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Berbagai

strategi pembangunan ekonomi dilakukan oleh pemerintah untuk berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai barometer keberhasilan dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia (IPM) yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) IPM berkisar antara 0-100, dimana daerah yang nilai IPM > 50 berada pada kelas pembangunan manusia yang rendah, daerah dengan IPM yang berkisar antara 50-65,99 berada pada kelas pembangunan manusia menengah ke bawah, sedangkan daerah dengan nilai IPM berkisar antara 66-80 berada pada kelas pembangunan manusia tinggi. Salah satu daerah di Indonesia yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya mengalami fluktuasi yakni Provinsi Bali yang terdiri dari 9 Kabupaten/Kota. Berikut merupakan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dari tahun 2017-2021 yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Bali					
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Jembrana	70,72	71,65	72,35	72,36	72,75
Tabanan	74,86	75,45	76,16	76,17	76,45
Badung	80,54	80,87	81,59	81,60	81,83
Gianyar	76,09	76,61	77,14	77,36	77,70
Klungkung	70,13	70,90	71,71	71,73	71,75
Bangli	68,24	68,96	69,35	69,36	69,37
Karangasem	65,57	66,49	67,34	67,35	67,36
Buleleng	71,11	71,70	72,30	72,55	72,56
Denpasar	83,01	83,30	83,68	83,93	84,03

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022*

Tabel 1. menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan angka IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali. Meskipun angka IPM cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi pertumbuhan IPM masih mengalami fluktuasi selama periode tahun 2017-2021, rata-rata pertumbuhan IPM cenderung masih rendah yakni di bawah 1 persen. Nilai IPM terendah terdapat pada Kabupaten Karangasem tahun 2017 yakni 65,57, sedangkan nilai IPM tertinggi terdapat pada Kota Denpasar tahun 2021 yakni mencapai 84,03. Perbedaan angka IPM tersebut dikarenakan akses terhadap fasilitas Kesehatan dan Pendidikan, serta keberadaan sumber daya yang berbeda antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. IPM Provinsi Bali secara keseluruhan terus meningkat, tetapi perbedaan angka IPM yang cukup jauh antara kabupaten/kota di Provinsi Bali merupakan masalah penting untuk diatasi (Nina dan Rustariyuni, 2018). Adanya kesenjangan antar daerah merupakan fokus utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat (Irawan, 2015). Adanya keterbelakangan dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin oleh rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (Hariawan dan Swaningrum, 2015). Perlunya peran pemerintah Provinsi Bali dalam melakukan pengembangan mutu modal manusia dalam hal Kesehatan, Pendidikan, serta pendapatan masyarakat secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan pertumbuhan IPM setiap tahunnya.

Saat ini di berbagai dunia sedang terjadi pandemi yang memiliki dampak relatif besar di seluruh sektor kehidupan manusia. World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 menjadi sebuah ancaman pandemi. Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu wabah yang berjangkit serempak dimana-mana atau mencakup geografi yang luas (Ristiyawati, 2020). Virus corona yaitu virus yang menyerang sistem pernapasan sehingga mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Yurianto dan Bambang (2020) mengungkapkan corona virus ini sendiri yaitu keluarga besar virus yang mengakibatkan penyakit mulai dari gejala ringan hingga berat. Setidaknya terdapat dua

jenis corona virus yang diketahui mengakibatkan penyakit yang bisa menimbulkan gejala berat (Zaenal et al., 2020). Adanya pandemi Covid-19 telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Covid-19 ini sangat berbahaya sehingga pemerintah menerapkan berbagai opsi untuk mengurangi penyebaran Covid-19, mulai dari pelaksanaan jaga jarak, sampai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB dimana aktivitas masyarakat dirumahkan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Pemberlakuan PSBB secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan para pekerja pada sektor pariwisata mengalami pemutusan hubungan kerja karena tidak adanya wisatawan yang berkunjung ke Bali. Adanya pandemi yang terjadi, tidak membuat pemerintah menurunkan upah minimum di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Sebagai salah satu dari barometer di dalam pengukuran-pengukuran berbagai macam kesejahteraan, maka pemerintah berperan aktif untuk mengatur upah. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Pemerintah telah mengatur Upah Minimum Kabupaten (UMK). Di berbagai provinsi ternyata penetapan upah minimum berbeda-beda, baik besarnya, persentase kenaikan setiap tahun, sistem penetapannya dan ruang lingkup yang di tetapkan.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Upah minimum sebagaimana yang dikemukakan di dalam teori upah efisiensi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja, sehingga berdampak pada meningkatnya hasil produksi dari suatu perusahaan. Pandangan teori upah efisiensi juga menganggap bahwa upah sebagai suatu biaya produksi, dan apabila terjadi kenaikan tingkat upah akan berdampak pada menurunnya permintaan akan tenaga kerja (Mankiw, 2006). Tingkat nilai upah minimum tiap kabupaten/kota berbeda, tergantung dari tarif biaya

hidup standar di kabupaten/kota dengan pertimbangan tingkat harga kebutuhan pokok daerah setempat, apabila kabupaten/kota memiliki tingkat upah minimum yang tinggi maka akan berdampak pada kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan kata lain, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan hasil produksi dari suatu perusahaan jika diikuti dengan kenaikan tingkat produktivitas sehingga akan berimbang pada peningkatan PDRB suatu daerah.

Upah Minimum Kabupaten merupakan standar upah minimum yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau pengusaha kepada karyawan/buruh/pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup minimum yang layak yang berlaku di provinsi bersangkutan. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya (Mankiw, 2003:133). Penetapan UMK yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya jumlah pengangguran yang ada, dimana dapat berpengaruh positif ataupun negatif.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak aktif sedang mencari pekerjaan yang diinginkannya (Trisnu, 2019). Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Ketika suatu daerah memiliki jumlah pengangguran yang tinggi, maka sebagian besar masyarakat tidak memiliki atau menghasilkan pendapatan. Hal ini berakibat pada rendahnya nilai pendapat suatu daerah. Suatu daerah yang memiliki pendapatan yang rendah akan sulit dalam menumbuhkan perekonomiannya sehingga daerah tersebut sulit untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi jumlah pengangguran maka masyarakat semakin tidak memiliki

pendapatan, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin tidak dapat dicapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pandemi Covid-19, upah minimum kabupaten, dan pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2017-2021. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Bali yang terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yaitu, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar. Pemilihan lokasi ini didasari karena Provinsi Bali memiliki data-data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, beserta sumber-sumber lainnya yang mendukung. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu penggabungan data time series dengan data cross section. *Data time series* yaitu 5 tahun data penelitian dari tahun 2017-2021, sedangkan data cross section yaitu 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali sehingga besar ukuran sampel pada penelitian ini adalah 45 pengamatan.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: pandemi Covid-19, upah minimum kabupaten, dan pengangguran terhadap variable terikat yaitu kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 D + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Kesejahteraan Masyarakat
- α = Koefisien Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- X_1 = Pandemi Covid-19
- X_2 = Upah Minimum Kabupaten
- X_3 = Pengangguran
- D = Dummy
- μ = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN**Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda dengan Variabel Dummy**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	66.23933	0.584828	113.2629	0.0000
X1	-0.459765	0.157769	-2.914167	0.0064
X2	3.47E-06	2.62E-07	13.23419	0.0000
X3	-0.021285	0.033153	-0.642020	0.5253

Sumber: *Data Diolah, 2022*

Berdasarkan hasil dan pengolahan data dengan bantuan software Eviews 10 maka dapat dijelaskan beberapa penjelasan yaitu pengaruh pandemi, upah minimum kabupaten, pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil analisis regresi linear berganda uji F, menunjukkan nilai probability yang diperoleh sebesar $0.000 < 0.05$, maka pandemi, upah minimum kabupaten, dan pengangguran secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Koefisien determinasi (R square) menunjukkan bahwa variabel pandemi, upah minimum kabupaten, dan pengangguran berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali sebesar 99,8 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,2 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil analisis regresi linear berganda uji t terhadap variabel pandemi (X1), memiliki koefisien regresi yang negatif dengan nilai sebesar -0.459765 terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya ketika terjadi kenaikan pandemi maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami penurunan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pandemi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, karena tingkat signifikan variabel pandemi $< 0,05$ yaitu sebesar 0.0064. Akibat dari pandemi Covid-19, kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan kegiatan masyarakat pada masa pandemi dibatasi oleh pemerintah (PSBB) sehingga berpengaruh terhadap sektor sosial dan ekonomi yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menurun.

Perbandingan indeks pembangunan manusia pada saat sebelum pandemi yakni pada tahun 2017-2019 mengalami fluktuasi dan pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan walaupun hanya di bawah 1 persen. Hal ini dikarenakan IPM Provinsi Bali tahun 2021 adalah sebesar 75,69 atau tumbuh 0,25 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Hasil analisis regresi linear berganda uji t terhadap variabel upah minimum kabupaten (X2), memiliki koefisien regresi yang positif dengan nilai sebesar 3.47 terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya ketika terjadi kenaikan sebesar 1 rupiah maka kesejahteraan masyarakat naik sebesar 3.47E-06 milyar rupiah dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali karena tingkat signifikan variabel upah minimum kabupaten $< 0,05$ yaitu sebesar 0.0000. Artinya bahwa peningkatan upah minimum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Peningkatan upah minimum regional akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Megantara dan Kembar Sri Budhi, 2020). Dalam hal ini jumlah upah minimum dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan, dan keperluan rumah tangga. Akibat peningkatan upah minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada human development index. Hasil studi ini sejalan dengan penelitian Chalid dan Yusuf (2014) yang menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap human development index. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya.

Hasil analisis regresi linear berganda uji t terhadap variabel pengangguran (X3), memiliki koefisien regresi yang negatif dengan nilai sebesar -0.021285 terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali karena tingkat signifikan variabel pengangguran $> 0,05$ yaitu sebesar 0.5253. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dikarenakan tidak semua orang yang menganggur itu miskin, sehingga mereka masih memiliki sumber keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan terpenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka bisa tetap dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Pengangguran yang ada biasanya merupakan orang-orang yang belum menemukan pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan dan derajat yang tinggi, sehingga mereka cenderung untuk menolak pekerjaan yang ada sebelum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Mereka menolak pekerjaan yang dirasa lebih rendah dikarenakan mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka, sehingga walaupun mereka menganggur, mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidup dan mereka masih tergolong masyarakat yang sejahtera. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisna, dkk (2022) yang menyatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

- 1) Pandemi, upah minimum kabupaten, dan pengangguran berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- 2) Pandemi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, upah minimum kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

SARAN

1. Pemerintah diharapkan dapat menaikkan upah minimum kabupaten, mengingat wabah Covid-19 sangat berdampak besar terhadap berbagai sektor, sehingga kebutuhan hidup layak setiap orang tetap dapat terpenuhi agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
2. Diharapkan antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pelaku usaha mempunyai komitmen bersama untuk saling bekerja sama dan saling

memberikan yang terbaik. Pengusaha diharapkan memberikan upah kepada para pekerjanya sesuai dengan upah minimum yang berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undang atau bahkan melebihi upah minimum sehingga para pekerja akan memberikan yang terbaik bagi perusahaan dengan meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.

REFRENSI

- Anonym. (2021). IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Tahun 2017-2020). Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
- Borgan Bonerri, Kadek. (2018). Pengaruh Pendidikan Dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Manado
- Benhard, Boockman. (2010). *The Combined Employment Effects of Minimum Wages and Labor Market Regulation: A Meta-Analysis*. IZA Discussion Paper. No. 4983.
- Chalid, Nursiah., & Yusuf Yusbar. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 22(2), hal. 1-12.
- Charitin, D. (2021). Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Tingkat Inflasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Nunukan. *Jurnal Ekonomika*, 12(01), 51–64.
- Clemens, J., Kahn, L. B., & Meer, J. (2018). The minimum wage, fringe benefits, and worker welfare (No. w24635). National Bureau of Economic Research.
- Devanto Shasta, Pratomo & Mahardika Adi Saputra, Putu. (2011). Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945. *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol. 5 No. 2, 269-285
- Devi, C. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Pdrb, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Nunukan. *Jurnal Ekonomika*, 12(1).
- Diannita, I. A. T., & I Wayan Wenagama. (2022). Pengaruh Investasi dan Pendapatan Asli Daerah Masyarakat di Wilayah Bali Timur. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol 11 No., 959–990.
- Dwirainaningsih, Y. (2017). Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 12.
- Fadlillah, dkk, R. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Jurnal EKOREGIONAL*, Vol.11, No 1.

- Gorahe, L. V., Waani, F., & Tasik, F. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangehe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Hariawan, P., & Swaningrum, A. (2015). Analisis Indeks Pembangunan Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran Di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8 (1), hal. 72-82.
- Heningtyas Utami, Ratri. (2013). Pengaruh Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional (UMR), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsepur (Kendal Demak Ungaran Semarang Grobogan Salatiga)
- Hukom, A. (2014). Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 120–129. <https://media.neliti.com/media/publications/44316-EN-hubungan-ketenagakerjaan-dan-perubahan-struktur-ekonomi-terhadap-kesejahteraan-m.pdf>
- Irawan, A. (2015). Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51:1, pp. 148-149.
- John, O. Aiyedogbon. 2012. Poverty and Youth Unemployment in Nigeria, 1987-2011. *International Journal of Business and Social Science*
- Kurniawan, Septyono & Sulistyaningrum, Eny. (2017). Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 No. 2. Agustus 2017: 193-215 PISSN: 2301-8968 EISSN: 2303-0186.
- Makinde, L. O., & Adegbam, A. (2019). Unemployment in Nigeria: Implication for Youths' Advancement and National Development. *Ilorin Journal of Administration and Development*, 5(2), 71–77.
- Musa, K. S., Maijama, R., National, N., Corporation, P., & Yakubu, M. (2019). Impact of Population Growth on Unemployment in Nigeria: Dynamic OLS Approach. *Journal of Economics and Sustainable Development*, February.
- Ndakularak E., Nyoman Djinar Setiawina, I. K. D. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 140–153.
- Neumark, D. (2017). the Employment Effects of Minimum Wages: Nber Working Paper Series No. 23587.
- Nina, G. A., & Rustariyuni, S. D. (2018). Pengaruh Gini Rasio, Pengeluaran Non Makanan dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), hal. 129-150.
- Osberg, L., & Sharpe, A. (2003). Human well-being and economic well-being: What values are implicit in current indices. *Inequality, Poverty and HumanWellBeing*, 1-60. Retrieved

- Paqueo, V. B., Orbeta, A., & Lanzona, L. (2016). The impact of legal minimum wages on employment, income and poverty incidence in the Philippines. Philippine Institute for Developing Studies Discussion Paper Series, 12.
- Prasetyo, A. (2016). Kajian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peningkatan Kemacetan Lalu Lintas di Perkotaan. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 18, 231–242.
- Risvi Said, Nurhikmah. (2017). Pengaruh Upah Minimum, Regional, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Di Kota Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Schwartz, J. Brad, Rachel Racelis dan David K. Gukey. (2010). Decentralization and Local Government Health Expenditures in the Philippines. Working Paper, The Measure Project Carolina Population Center.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ecoomia*, 9(1), 18-26. <https://doi.org/4102002>
- Shavira, S. O., Balafif, M., & Imamah, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Bharanomics*, 1(2), 93-103.
- Silvia, I.D., dan Sumarto, S. (2014). Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-Poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 50(2). pp: 227-242
- Simona Ferraro, Birgit Hanilane & Karsten Staehr. (2018). Minimum Wages and Employment Retention: A Microeconometric Study for Estonia. *Baltic Journal of Economics*. Vol. 18, No. 1, 51-67. ISSN: 1406-099X.
- Simpem Ariani, Putu & Gede Bendesa, I Komang. (2012). Pengaruh Hari Raya Galungan Pada Seasonal Adjustment IHK dan Penentuan Komoditas Utama yang Mempengaruhi Inflasi di Provinsi Bali: Analisis Arima. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 5 No. 2: 79-86. ISSN: 2301-8968
- Suhandi, Hendra Wijayanto dan Samsul Olde. 2020. Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Infonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 13(1), 85-94
- Suryahadi, Asep., Hadiwidjaja, Gracia and Sudarno Sumarto. (2012). Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia before and after The Asian Financial Crisis. The SMERU Research Institute Jakarta
- Teneh, E. G., Kumenaung, A. G., & Naukoko, A. T. (2019). Dampak Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Sulawesi (2014-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04).

- Triariani, E. E. (2013). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi*, 13(1), hal. 1-20.
- Vivi Gorahe, L., Waani, F., & Tasik, F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bambahene Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EKSEKUTIF*, 1(1), 5–24.
- Wandita, D. T., & Fithriani, R. (2021). Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kesejahteraan Penduduk di Pulau Sumatera. *Modus*, 33(1), 90-97.
- Wildan, Syafitri. (2013). Determinants of Labour Migration Decisions: The Case of East Java, Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 49:3, 385-386, DOI:10.1080/00074918.2013.850638.
- Yasa, I. K. O. A., & Arka, S. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8 No. 1.
- Yaumidin, U. K. (2016). Aggregate Demand, Unemployment, and Employment Policies in the Indonesia' s Industrial Sector. *Accelerating the World's Research*.